



# **AKUNTABILITAS PENYELENGARAAN PENDIDIKAN TINGGI**

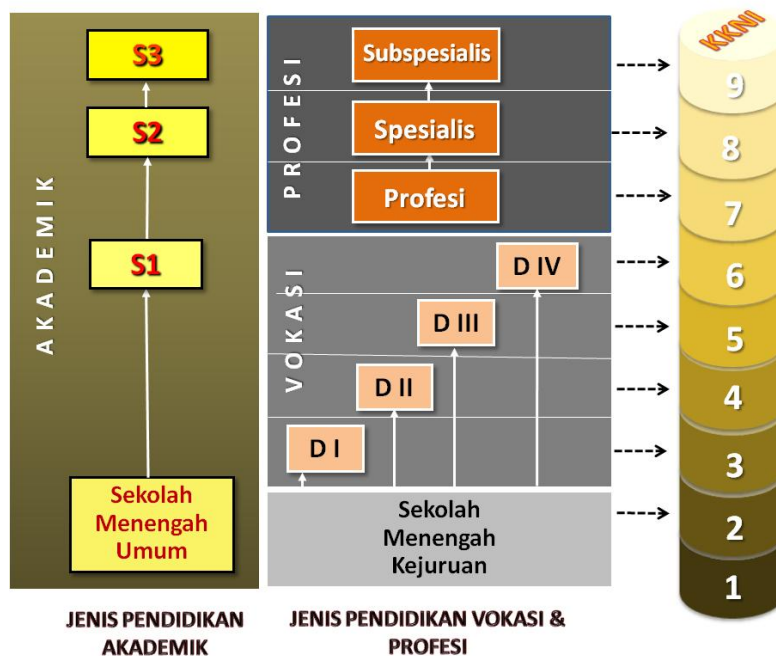
**Dokumen 004**



**Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Republik Indonesia  
2015**

## Kesetaraan Jenjang Kualifikasi Untuk Ranah Pendidikan

Penilaian kesetaraan terhadap capaian pembelajaran yang dihasilkan pendidikan berbasis keilmuan dan keahlian ditunjukkan pada Gambar 1. Penetapan kesetaraan jenjang kualifikasi pada KKNi untuk masing-masing program pendidikan dilakukan melalui analisis terhadap deskripsi capaian pembelajaran yang dikumpulkan dari kurang lebih 1000 program studi berakreditasi A atau B pada 97 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ke-97 perguruan tinggi yang dipilih terdiri dari perguruan tinggi yang telah memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internasl (SPMI) berkategori baik atau memiliki rekam jejak kerjasama internasional yang menonjol. Analisis dan penetapan jenjang kualifikasi dilakukan bersama-sama oleh program studi sejenis sampai tercapai kesepakatan bersama baik untuk deskripsi capaian pembelajaran maupun jenjang kualifikasi pada KKNi. Deskripsi kualifikasi untuk capaian pembelajaran masing-masing program studi juga diperkaya dengan melakukan komparasi dengan berbagai negara serta diskusi intensif dengan asosiasi profesi, kolegium keilmuan, dan pengguna lulusan terkait.



Gambar 1. Kesetaraan capaian pembelajaran dan jenjang kualifikasi pada KKNi untuk masing-masing program pendidikan dan jenis pendidikan berbasis keilmuan maupun keahlian.

Kualifikasi Jenjang 1 pada KKNi dimaksudkan untuk kualifikasi tenaga kerja Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, berpengetahuan faktual dasar, atau dalam ranah pendidikan adalah luaran pendidikan wajib belajar 9-tahun atau lulusan tingkat SMP. Tujuan utama dari

penilaian kesetaraan jenjang sebagaimana dinyatakan dalam diagram di atas adalah agar semua program pendidikan di Indonesia, dimulai dari sekolah menengah tingkat atas (SMA, SMK) sampai pada pendidikan tinggi (sarjana, diploma, spesialis, pasca sarjana) wajib menghasilkan lulusan dengan **kualifikasi minimal** setara dengan kualifikasi KKNI pada jenjang yang sesuai.

Dalam naskah yang terpisah telah disusun secara lebih rinci, deskripsi capaian pembelajaran serta kualifikasi untuk lulusan program studi yang dianggap penting atau diprioritaskan dalam kaitan dengan pembangunan nasional seperti misalnya hukum, politik dan pemerintahan, administrasi negara, kesehatan, teknik dan pertanian.

### **Asesmen Capaian Pembelajaran**

Kamus Longman Bahasa Inggris (1984) mendefinisikan kata kerja '*to assess*' sebagai '... untuk menentukan pentingnya, ukuran, atau nilai (1984:86). Kata benda '*assessment*' berasal dari kata kerja ini, dan mengacu untuk proses menentukan pentingnya, ukuran atau nilai, atau nilainya (ukuran, dll) itu sendiri. Penggunaan teknis dari istilah tersebut dalam bidang pendidikan dan pelatihan ini berasal dari makna umum tersebut. Oleh sebab itu asesmen (*assessment*) dalam bidang pendidikan dan pelatihan adalah tentang bagaimana kita menilai apakah (dan apa) pembelajaran telah terjadi.

Asesmen memegang peran penting dalam kurikulum dan memiliki berbagai manfaat - untuk siswa, guru dan lembaga secara keseluruhan.

### **Manfaat**

#### *Bagi siswa,*

- Memungkinkan mereka untuk menunjukkan pembelajaran mereka
- Memungkinkan mereka untuk meningkatkan pembelajaran mereka dan belajar
- Bertindak sebagai faktor pendorong dengan memberikan fokus Mendukung belajar untuk kegiatan belajar mereka dengan rentang waktu dan tenggat waktu untuk bekerja
- Memberikan tantangan intelektual dan dapat merangsang minat mereka
- Dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama
- Pada akhirnya memutuskan klasifikasi gelar yang mereka peroleh

#### *Untuk staf,*

- Memberikan kesempatan untuk memberikan konstruktif dan mendorong memberikan umpan balik kepada siswa
- Memungkinkan mereka untuk memantau efektivitas pengajaran

- Memungkinkan mereka untuk membuat keputusan tentang apakah siswa dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi
- Membantu mereka untuk memutuskan klasifikasi gelar yang dapat mereka peroleh

#### *Untuk Institusi,*

- Menjamin dan menjunjung tinggi standar lembaga
- Memungkinkan lembaga untuk memperoleh pengakuan publik

Dalam konteks perancangan kurikulum, asesmen harus dilihat sebagai bagian penting dan tak terpisahkan dari proses pembelajaran dan bukan sesuatu yang dilakukan di akhir perkuliahan sebagai suatu hasil pembelajaran, atau hanya untuk mengukur hasil pembelajaran setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Asesmen harus direncanakan ke dalam kurikulum pada tahap awal. Seperti dikemukakan Ramsden (2003), penilaian mendefinisikan kurikulum untuk mereka, dan menentukan bagaimana mereka akan menggunakan waktu dan mengatur studi mereka. Sebagai tekanan meningkat pada siswa, mereka mungkin menjadi lebih dan lebih strategis, dan penilaian kemudian dapat menentukan apa dan bagaimana siswa belajar.

### **Asesmen Formatif dan sumatif**

Asesmen dibedakan antara asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif dilakukan untuk membantu rencana bagaimana mengajar atau belajar harus dilakukan, atau untuk mengubah cara mengajar atau belajar ketika sedang terjadi. Penilaian sumatif hanya memberitahu kita apa yang telah dipelajari pada akhir belajar atau proses mengajar. Dalam prakteknya, banyak latihan penilaian dilakukan sebagian dalam bentuk formatif, dan sebagian sumatif.

### **Pengukuran (*measurement*)**

Penilaian pembelajaran melibatkan beberapa jenis pengukuran. Ini mungkin diungkapkan dengan cara kuantitatif (seperti ketika siswa mendapatkan 7 pertanyaan benar dari 10 pertanyaan yang diberikan, maka diberi penghargaan tanda 70 persen). Atau bisa juga menggunakan beberapa sistem lain dengan cara kode. Yang umum digunakan adalah A, B, dan C.

### **Penilaian (*judgement*)**

Untuk mengukur sesuatu (misalnya seberapa banyak orang telah belajar). Kita harus memutuskan bahwa esai siswa adalah B+ (bukan A, B atau C), atau bahwa kualitas kemajuannya dalam matematika membenarkan alokasi ke Pythagoras kategori (bukan Fibonacci atau Einstein). Dalam rangka untuk membuat penilaian ini, kita harus membandingkan dengan beberapa cara. Beberapa literatur penilaian menjelaskan tiga hal utama untuk membandingkan, yaitu:

- Pertama, kita dapat membandingkan kemajuan seorang pelajar dengan apa yang diketahui sebelumnya.

- Kedua, kita dapat membandingkan dengan orang lain. Hal ini sangat umum di pendidikan dan pelatihan.
- Ketiga, kita dapat membandingkan dengan beberapa kriteria dipilih atau kriteria prestasi

### **Prinsip-prinsip asesmen (penilaian)**

Prinsip-prinsip penilaian mengharuskan penilaian bersifat sahih, dapat diandalkan, fleksibel dan adil.

- Kesahihan/validitas mengacu pada sejauh mana interpretasi dan penggunaan hasil penilaian dapat didukung oleh bukti. Sebuah penilaian dinyatakan sahih apabila metode dan bahan penilaian mencerminkan elemen, kriteria kinerja dan aspek kritis dari kompetensi.
- Keandalan mengacu pada tingkat konsistensi dan akurasi dari hasil penilaian. Artinya, sejauh mana penilaian akan memberikan hasil yang serupa untuk calon dengan kompetensi yang sama pada waktu atau tempat yang berbeda, terlepas dari siapa yang melakukan penilaian.
- Fleksibilitas mengacu pada kesempatan bagi seorang kandidat untuk menegosiasikan aspek-aspek tertentu dari penilaian (misalnya, waktu) dengan asesor. Semua calon harus sepenuhnya diinformasikan (misalnya, melalui Rencana Penilaian) dari tujuan penilaian, kriteria penilaian, metode dan alat yang digunakan, dan konteks dan waktu penilaian.
- Penilaian yang adil tidak merugikan kandidat atau kelompok tertentu. Ini berarti bahwa metode penilaian harus disesuaikan untuk kandidat tertentu (seperti orang cacat atau perbedaan budaya) untuk memastikan bahwa metode tersebut tidak merugikan mereka karena situasi mereka. Sebuah penilaian tidak harus menempatkan tuntutan yang tidak perlu pada calon yang dapat mencegah calon untuk mendemonstrasikan kompetensi (misalnya, penilaian tidak harus menuntut kemampuan bahasa Inggris yang lebih tinggi atau literasi yang lebih tinggi daripada yang diperlukan untuk melakukan standar kerja yang digariskan dalam kompetensi yang dinilai).

### **Penilaian Pengalaman Belajar Lampau (*Assessment of Prior Experiential Learning*)**

Menempatkan kompetensi atau kinerja pada konteks mengajar dan belajar memiliki implikasi lain. Belajar tidak lagi dipikirkan dalam konteks proses dimana pengetahuan, keterampilan atau sikap dikembangkan, tetapi sebaliknya, dilihat dalam hal apa yang dapat dilakukan seseorang ketika proses pembelajaran selesai. Pada saat yang sama, kita menekankan pada belajar bukan pada mengajar, yaitu menekankan pada peran siswa bukannya pada peran guru/pengajar. Apabila kita tertarik tidak kepada apa yang seseorang telah pelajari, tetapi kepada apa yang seseorang tahu (atau bisa lakukan), mengapa kita harus tertarik pada bagaimana pengetahuan, keterampilan atau sikap itu dicapai? Apabila seseorang tahu sesuatu, apakah penting mengetahui bagaimana mereka sampai ke tahu itu?

Pandangan bahwa apa yang orang tahu atau dapat lakukan daripada bagaimana mereka mencapai pengetahuan itu mendasari gerakan yang dikenal sebagai '*assessment of prior experiential learning*' (APEL). Sangat sering terjadi diskusi yang mencampuradukkan istilah ini dengan gerakan pengalaman belajar secara keseluruhan, dan dengan slogan-slogan seperti 'membuat pengalaman dapat dihitung'. Hal ini dapat dimengerti. Belajar dari pengalaman adalah fakta, setiap orang belajar dari pengalaman mereka. Masalahnya adalah bagaimana membuat belajar dari pengalaman ini 'dihitung' sejauh sistem pendidikan dan lembaga yang bersangkutan tertarik.

Tentu saja, dalam arti mendasar penilaian pembelajaran lampau (atau pengalaman belajar lampau) telah lama ada setidaknya selama penilaian itu sendiri. Sistem penilaian luar telah lama menyediakan metode bagaimana pembelajaran lampau dinilai. Selama lebih dari satu abad, misalnya, University of London telah menawarkan ujian terbuka untuk semua itu. Biasanya para siswa mengikuti belajar secara pribadi dan menghadiri kelas-kelas yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, namun biasanya jarang menjadi persyaratan untuk melakukan hal tersebut. Atas dasar "hanya" pengalaman, seseorang dapat mengikuti ujian dan dinilai kemampuannya.

Hanya sedikit pendukung pembelajaran lampau senang dengan hal ini, namun mereka umumnya berpendapat bahwa silabus dikenakan untuk pemeriksaan tersebut, dan gagasan tentang 'penilaian tak terlihat', mencerminkan jenis pengetahuan dihargai di lembaga-lembaga pendidikan tradisional. Sementara beberapa pengetahuan ini mungkin berguna, sebagian besar dipandang sebagai *overspecialized*. Yang penting adalah keterampilan yang dapat ditunjukkan oleh siswa, daripada konten yang spesifik. Sebagai hasilnya, gerakan pengalaman pembelajaran lampau telah mencoba untuk menentukan mekanisme di mana individu dapat belajar tidak saja dari pengalaman mereka, tetapi mereka dapat pula menunjukkannya.

Pendekatan yang paling umum adalah pendekatan 'portofolio'. Pengalaman memiliki arti yang beragam, yang penting dalam hal ini adalah bukan apa pengalaman tersebut, tapi apa yang telah dipelajari seseorang dari pengalaman. Evans (1987, 1992) menyarankan empat tahap pendekatan:

- 'Sistematis refleksi atas pengalaman untuk belajar yang signifikan. "Evans (1987:13) menggambarkan tahap ini sebagai 'latihan brainstorming'. Titik awal mungkin anak, hubungan, foto, gambar, tulisan, musik, dan sebagainya.
- Identifikasi belajar yang signifikan, dinyatakan dalam pernyataan yang tepat, merupakan pernyataan kepada kepemilikan pengetahuan dan keterampilan. Kuncinya, di sini adalah untuk berpindah dari ciri umum pengalaman belajar kepada suatu perincian dari rincian pembelajaran yang tepat yang telah terjadi. Biasanya, kategori pengetahuan atau keterampilan dapat digunakan dalam proses ini, seperti, penanganan informasi, analisis, membaca, menulis, dan sebagainya.

- "Sintesis bukti untuk mendukung pernyataan pengetahuan dan keterampilan Yang dimiliki". Ini melibatkan pemeriksaan rinci bukti untuk mendukung pernyataan telah belajar, biasanya dalam bentuk portofolio. Dalam hal ini sering diperlukan bimbingan dari tutor dan konselor.
- "Penilaian akreditasi." Ini dimulai dengan penilaian diri, karena ini dapat mempengaruhi bagaimana seorang siswa ingin menggunakan bukti (misalnya untuk pendidikan atau pekerjaan). Kemudian dilakukan asesmen oleh staf dari lembaga pendidikan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan situasi, dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon.

Pada tanggal 30 Januari 2008 Indonesia telah menandatangani UNESCO '**Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific**' (**Konvensi**) yang antara lain terdiri dari bagian kewenangan otoritas penilaian ijazah dan kualifikasi (Section II), prinsip dasar penilaian kualifikasi (Section III), pengakuan kualifikasi untuk memasuki perguruan tinggi (Section IV), pengakuan masa studi (Section V), pengakuan kualifikasi pendidikan tinggi (Section VI), pengakuan kualifikasi pengungsi (Section VII), informasi tentang asesmen, akreditasi, dan pengakuan (Section VIII), dan implementasi (Section IX).

Konvensi ini mensyaratkan adanya suatu badan yang berwenang melakukan pengakuan/penyetaraan ijazah di setiap negara anggota (**Competent Recognition Authority**) (Konvensi Article II.2). Untuk pendidikan tinggi di Indonesia pada saat ini sudah ada suatu unit penyetaraan ijazah luar negeri yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu juga telah ada suatu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang independen.

Sebagai negara yang telah menandatangani Konvensi tersebut di atas Indonesia harus mempersiapkan perangkat keras maupun lunak yang diperlukan untuk melaksanakan Konvensi itu. Peraturan-peraturan yang disusun, setelah disetujui bersama, adalah mengikat (Konvensi Article II.3).

Konvensi juga menyatakan bahwa semua orang yang mempunyai ijazah dari salah satu negara penandatanganan Konvensi berhak mengajukan ijazahnya untuk dinilai kesetaraannya oleh badan yang berwenang di negara penandatanganan Konvensi (Konvensi Article III.1). Hal itu mengharuskan Indonesia untuk segera menunjuk atau membentuk suatu Badan yang berwenang melakukan penilaian ijazah dari anggota Konvensi secara transparan, koheren, dan terpercaya (Konvensi Article III.2).

Keputusan tentang pengakuan kesetaraan ijazah dibuat berdasarkan informasi yang sah terhadap kualifikasi yang dimintakan pengakuannya. Keabsahan informasi merupakan tanggungjawab pemohon penyetaraan dan perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah tersebut. Keputusan pengakuan kesetaraan ijazah harus dibuat oleh badan yang berwenang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jika terjadi ketidaksesuaian antara pemohon dan badan penilai kesetaraan ijazah, maka alasan penolakan perlu diberikan. Pemohon juga diberi

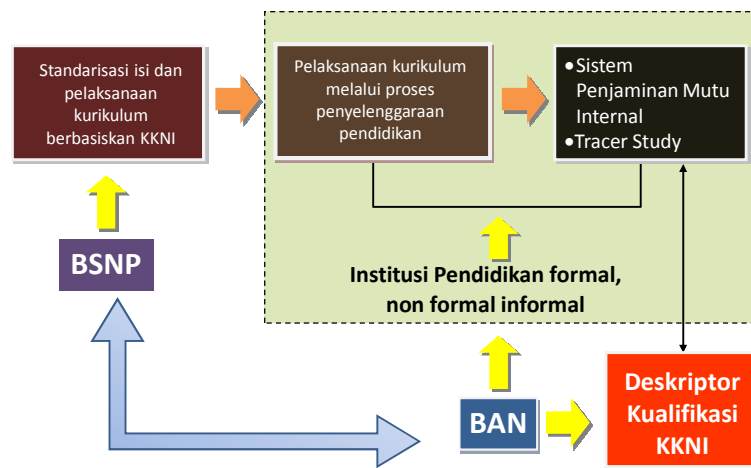
kesempatan untuk melakukan peninjauan kembali keputusan tersebut (Konvensi Article III.5).

## Penjaminan Mutu Kerangka Kualifikasi

Sistem penjaminan mutu kerangka kualifikasi serta proses penilaian kesetaraan kualifikasi harus memenuhi aspek perbaikan mutu berkesinambungan yang bermuara pada peningkatan kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri. Sistem ini juga wajib memenuhi kriteria efisiensi dan mempertimbangkan berbagai kepentingan.

Penjaminan mutu kerangka kualifikasi merupakan tugas penting dari BKNi dengan melakukan penilaian berkala terhadap keabsahan dan keberlakuan kualifikasi yang selaras dengan tuntutan dunia kerja serta kemajuan ilmu dan teknologi.

Dalam sistem penjaminan mutu KKNi yang berkaitan langsung dengan sistem pendidikan nasional, maka BSNP akan mengadopsi deskripsi masing-masing jenjang kualifikasi sebagai rujukan dalam menyusun Standar Pendidikan Nasional. Selanjutnya sistem penjaminan mutu internal di institusi penyelenggara pendidikan melakukan proses penjaminan mutu terhadap kualifikasi capaian pembelajaran dari lulusan yang dihasilkan. BAN sebagai badan eksternal penjaminan mutu tidak hanya melakukan *assesment* pada input dan proses pendidikan, tetapi menekankan pula pada *assesment* terhadap capaian pembelajaran merujuk deskriptor KKNi (lihat **Gambar 2**).



### Sistem penjaminan mutu internal dan eksternal untuk mencapai kualifikasi capaian pembelajaran

**Gambar 2.** Sistem penjaminan mutu internal dan eksternal untuk mencapai kualifikasi capaian pembelajaran



**Disusun oleh Tim KKNi  
Megawati Santoso, Ardhana Putra, Junaedi Muhidong,  
Illah Sailah, SP Mursid, Achmad Rifandi, Susetiawan, Endrotomo**

**Editor: Yusring Baso**